

REFERENCE

- Beard, Adrian. (2000). *The Language of Politic*. Padstow Cornwall: TJ**
- Chilton and Schaffner. (1997). 'Discourse and Politics' in *Discourse as Social Structure and Process*. Ed. Teun A. Van Dijk. London:Sage Vol 2**
- Febriana, Dipa (2005). *A study of illocutionary act in Harry Potter and Chamber of Secrets by J. K Rowling*. Unpublished thesis**
- Lazuka, Anna (2006). 'Communicative Intention in George W Bush's presidential Speeches and Statements from 11 September 2001 to 11 September 2003' in *Discourse and Society*. Ed. Teun A. Van Dijk. London:Sage Vol 1**
- Mccarthy, Michael (1991). *Discourse Analysis for Language Teacher*. New York: Cambridge Press**
- Mey. Jacob L. (1993). *Pragmatic*. Cambridge: Blackwell PublisherLtd**
- Neuman, W. Lawrence. (1991). *Social research Method. (Qualitative and Quantitative Approaches)*. 3rd edition. United States:Allyn and Beacon**
- Saeed, J. I. (2001). *Semantics*. Massachussets:Blackwell PublisherLtd**
- Scriffin, Deborah (1994). *Approaches to Discourse*. Massachussets: Blackwell Publisher Ltd.**
- Searle, John R. (1979). *Speech Acts*. Cambridge: Cambridge University press.**

Winarti, Anik (2005). *A study of speech act in instant messenger chat spoken by the English department student of Airlangga University*. Unpublished thesis

Yule, George (1996). *Pragmatics*. Oxford : Oxford University Press

APPENDICES

Pidato Politik
Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
sebagai
Presiden RI Terpilih untuk Masa Jabatan 2004-2009

Cikeas, 9 Oktober 2004

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua.

Rakyat Indonesia di seluruh pelosok negeri yang saya cintai.

Pertama-tama, kita semua bersyukur bahwa bangsa kita telah berhasil melakukan serangkaian Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2004 secara damai dan demokratis. Hal ini menandai semakin mekarnya kehidupan demokrasi. Kita telah melangkah maju melakukan modernisasi politik, dengan membangun budaya politik yang lebih baik. Alhamdulillah, melalui pemilihan langsung, kita dapat mengeliminasi distorsi dan manipulasi suara rakyat, the voice of the people.

Sebagaimana kita ketahui bersama, tanggal 4 Oktober 2004, KPU telah mengumumkan dan memutuskan bahwa saya, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Pak Jusuf Kalla telah meraih suara terbanyak, sekitar 60 % lebih, dalam Pilpres putaran kedua untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004-2009. Selanjutnya, pada tanggal 7 Oktober 2004, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa hasil KPU tersebut bersifat final dan mengikat. Untuk ini, saya bersyukur kepada Allah SWT diberkahi dengan kepercayaan rakyat untuk memimpin bangsa yang besar ini.

Saya mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang diberikan. Ini adalah kepercayaan yang saya terima dengan penuh tanggung jawab dan kesiapan bekerja keras.

Saya mengucapkan terimakasih kepada para pemilih dan seluruh pendukung. Juga kepada seluruh relawan yang terhimpun dalam berbagai organisasi di seuruh pelosok negeri. Serta kepada partai-partai pendukung, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, kelompok-kelompok profesi, asosiasi, perhimpunan, gerakan-gerakan masyarakat, dan insan pers di seluruh tanah air. Bersama rakyat, saudara semua telah berjuang dan membuktikan bahwa suara rakyat telah menemukan ruang yang tepat. Sekali lagi terimakasih.

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah Haz beserta seluruh jajaran pemerintahan, baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Saya berkehormatan mendapat tongkat estafet kepemimpinan bangsa dari Presiden Megawati, dan saya



menghargai dapat bekerja dengan beliau dalam membangun demokrasi kita yang masih baru ini.

Terimakasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada KPU dan Panwaslu yang telah berhasil menyelenggarakan seluruh rangkaian pemilu secara baik. Juga penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada Jajaran Kepolisian Negara di seluruh pelosok tanah air yang telah berhasil mewujudkan pemilu yang aman.

Rakyat Indonesia di seluruh pelosok negeri yang saya cintai.

Insya Allah, saya akan mengemban amanah rakyat ini. Saya akan bekerja keras melanjutkan tugas pengelolaan kehidupan pemerintahan dan kenegaraan. Oleh karenanya, saya mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia.

Pemilu sudah berakhir, dan saya mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk melihat ke depan. Kita perlu memperkuat persaudaraan dan persatuan. Marilah Kita jemput masa depan secara bersama-sama. Bagi yang memilih Ibu Megawati atau Calon Presiden yang lain, mari kita pandang hal ini sebagai realitas demokrasi. Ada masa untuk bersaing, ada masa untuk bersatu. Saya berjanji untuk menjadi Presiden untuk semua insan Indonesia, untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh insan Indonesia, dan akan berdiri di atas semua golongan.

Mulai hari ini, mari kita tanggalkan simbol-simbol pemilu, simbol-simbol kompetisi. Kita lepas baju-baju, atribut-atribut, semboyansemboyan, yel-yel, dan sentimen-sentimen pemilu lainnya. Kita simpan semua simbol ini dan kita ganti dengan jiwa dan semangat kebersamaan mewujudkan Indonesia yang lebih baik untuk semua dan oleh semua.

Mari kita buka lembaran baru. Kita bulatkan tekad dan semangat kita untuk merebut masa depan. Dan, kita jadikan masa lalu sebagai wahana belajar bersama untuk menyikapi masa kini dan menata masa depan.

Dalam jangka dekat mendatang, saya akan memusatkan perhatian untuk menjalankan tiga agenda. Yang pertama, berkait dengan berbagai kegiatan dalam rangka transisi dan proses alih tugas. Untuk ini, kita perlu menjamin adanya komunikasi dan koordinasi. Jangan sampai ada gap antara Pemerintahan Ibu Megawati dan Pemerintahan saya yang Insya Allah akan dilantik tanggal 20 Oktober nanti. Kita perlu menjamin agar tugas-tugas pengelolaan Pemerintahan, termasuk pelayanan masyarakat, tidak terputus atau terbengkalai.

Agenda kedua adalah penyusunan Kabinet periode 2004 - 2009. Saya akan merancang struktur dan deskripsi tugas Pemerintahan saya. Saya akan menentukan agenda dan prioritas Kabinet. Saya akan menetapkan aturan main dan etika yang harus dihormati seluruh anggota Pemerintah saya. Saya akan memulai proses penunjukkan Calon Menteri, dan akan segera melakukan komunikasi dan

seleksi calon-calon Menteri. Saya akan memfinalisasi penyusunan Kabinet dan mengumumkannya pada tanggal 20 Oktober.

Agenda penting ketiga adalah menentukan Program dan Aksi 100 hari pertama Pemerintahan saya. Saya akan segera bekerja secara dini dan intensif dengan lembaga-lembaga tinggi negara. Saya akan melakukan review APBN tahun 2005. Saya akan melakukan review proses penegakan hukum, termasuk di bidang korupsi. Saya akan segera mengambil langkah awal untuk menyelesaikan konflik di daerah. Saya akan segera melakukan langkah pemberantasan korupsi. Saya akan segera melakukan langkah untuk menstimulasi ekonomi. Dan saya akan segera meletakkan fondasi yang efektif untuk memajukan pendidikan nasional.

Saudara sebangsa setanah air,

Kita kini berada di ambang era baru dalam sejarah Indonesia. Tantangan yang kita hadapi sangat berat, namun tekad kita untuk berhasil juga sama kuatnya.

Marilah kita satukan tekad, dan satukan langkah untuk bersamasama membangun Indonesia yang lebih baik.

Oleh karena itu, saya mengajak seluruh rakyat, seluruh pemimpin dari berbagai lapisan, seluruh tokoh masyarakat, dan seluruh elit negeri untuk bersatu dan berjuang bersama. Mari kita rebut masa depan. Mari kita pastikan kehidupan kita dan anak cucu kita lebih baik.

Mari kita bersama memohon perkenan Tuhan, Allah SWT. Memohon perlindunganNya dan memohon diberinya kekuatan dalam mewujudkan perubahan yang terbaik bagi rakyat.

Terimakasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.

**PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SERTA KETERANGAN PEMERINTAH ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007**

BESERTA NOTA KEUANGANNYA

**DI DEPAN RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 16 Agustus 2006

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat yang terhormat,
Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan para Anggota Lembaga-lembaga
Negara,
Yang Mulia para Duta Besar dan Kepala Perwakilan Badan-badan dan
Organisasi Internasional,
Hadirin yang saya muliakan,
Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Marilah kita memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena
atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hari ini. Saya
mengucapkan terima kasih kepada Dewan, yang telah memberikan
kesempatan kepada saya, untuk menyampaikan pidato kenegaraan dan
Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN
Tahun Anggaran 2007, beserta Nota Keuangannya.

Besok, Insya Allah, kita akan memperingati detik-detik Proklamasi
Kemerdekaan negara kita yang ke-61. Marilah kita sejenak menundukkan
kepala, untuk memanjatkan puji dan syukur yang sedalam-dalamnya ke
hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat kemerdekaan yang telah kita
peroleh. Atas berkat, rahmat dan karunia-Nya jua, selama 61 tahun ini,
bangsa dan negara kita tetap tegak berdiri. Segala cobaan dan ujian, yang
datang silih berganti selama 61 tahun ini, telah menempa ketangguhan dan
keuletan kita sebagai bangsa, untuk terus berjuang mencapai cita-cita
luhur dan mulia.

Sebagai refleksi kesejarahan di hari yang membahagiakan ini, kita semua patut menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya, kepada semua pejuang dan pahlawan bangsa, yang telah mendharmabaktikan hidupnya, bahkan jiwa dan raganya, untuk mencapai, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Ungkapan rasa hormat yang dalam, saya sampaikan pula kepada para Presiden pendahulu saya, yang kepemimpinannya kini saya lanjutkan, yakni Dr. Ir. Soekarno, Jenderal Besar Soeharto, Prof. Dr. B.J. Habibie, KH Abdurrahman Wahid dan Ibu Megawati Soekarnoputri, atas dharma bhakti dan sumbangsih beliau-beliau semua, dalam memimpin bangsa dan negara, sehingga kita sampai kepada tingkat kemajuan sekarang ini. Ungkapan serupa saya sampaikan pula kepada para Perdana Menteri Republik Indonesia --- sejak PM Sutan Sjahrir hingga PM Djuanda --- yang telah memimpin pemerintahan negara kita, selama kita menerapkan sistem pemerintahan parlementer di masa yang lalu.

Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan tahun ini, kita laksanakan dalam paduan perasaan, kebahagiaan dan keprihatinan. Masih segar dalam ingatan kita, bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan Kepulauan Nias, akhir Desember 2004. Bencana serupa, walau dengan skala lebih kecil, kembali melanda pantai selatan Pulau Jawa. Sebelumnya bencana gempa juga melanda Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sementara bencana yang lebih kecil juga terjadi di berbagai daerah di Tanah Air. Negeri kita memang terletak di kawasan yang rawan bencana. Namun keadaan ini, haruslah membuat bangsa kita menjadi lebih tegar, lebih tangguh dan senantiasa siap sedia menghadapi setiap tantangan dan masalah. Ketegaran dan ketangguhan itu, akan menjadi modal yang sangat penting dalam kita berjuang membangun bangsa dan negara, menuju keadaan yang lebih baik.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, tidak ada suatu bangsa yang menjadi bangsa yang jaya, tanpa ujian. Upaya memecah-belah persatuan bangsa telah beberapa kali terjadi, namun semua itu berhasil kita atasi. Krisis demi krisis telah datang silih berganti dalam perjalanan sejarah kita, namun semua itu dapat kita selesaikan. Kita meyakini, bahwa susunan dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah pilihan tepat dan final.

Atas ketetapan dan pilihan kita itu, kita harus terus membangun negara, menuju keadaan yang aman dan damai, adil dan demokratis, serta sejahtera, yang menjadi cita-cita dan tujuan kemerdekaan bangsa kita. Kemiskinan dan keterbelakangan harus kita perangi. Konflik dan permusuhan harus kita akhiri. Keadilan dan kesejahteraan harus terus kita tingkatkan. Rasa aman dan damai harus kita mantapkan. Kita patut bersyukur, bahwa dalam setahun belakangan ini, ancaman dan gangguan keamanan di berbagai wilayah telah mereda. Masyarakat yang tinggal di

daerah-daerah yang pernah dilanda konflik seperti di Poso, Maluku dan Maluku Utara, kini telah menikmati hidup yang jauh lebih aman dan damai. Begitu pula di daerah-daerah lain.

Dalam pidato kenegaraan tahun yang lalu, secara khusus saya telah menyampaikan langkah-langkah yang ditempuh Pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Aceh dan Papua. Alhamdulillah, dalam setahun ini, kita telah mencapai banyak kemajuan yang mengandung harapan. Situasi keamanan dan perdamaian di Aceh telah tercipta. Belum lama ini, saya telah mensahkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, untuk memenuhi harapan seluruh rakyat di daerah itu. Saya berpesan kepada semua pihak, terimalah undang-undang ini dengan baik, sebagai landasan untuk membangun masa depan Aceh yang lebih sejahtera. Melalui proses pembahasan yang demokratis dan transparan, Pemerintah dan DPR RI telah bekerja keras untuk melahirkan Undang-Undang tersebut.

Kita juga telah mencatat banyak kemajuan dalam menciptakan suasana yang lebih baik di Papua. Pemerintah mengedepankan dialog dan pendekatan persuasif dalam menangani berbagai masalah di daerah itu. Kita bersyukur, bahwa lembaga-lembaga pemerintahan daerah di Papua, telah dapat berfungsi untuk melaksanakan otonomi khusus, sebagaimana kita harapkan. Belum lama ini, proses Pilkada di Papua ---dan juga di Irian Jaya Barat--- telah berhasil dilaksanakan secara demokratis, aman dan damai.

Suasana yang kondusif ini, kita harapkan akan mendorong percepatan pembangunan di daerah itu, sehingga rakyat di Papua benar-benar dapat menikmati kemerdekaan, seperti telah dinikmati oleh saudara-saudaranya di daerah lain. Pemerintah dengan sungguh-sungguh memikirkan dan mengambil langkah-langkah yang lebih kongkrit, untuk memajukan kesejahteraan rakyat di Papua, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, permukiman penduduk dan ketahanan pangan. Pemerintah berupaya dengan penuh kesungguhan, untuk memberikan kesempatan dan kesetaraan kepada putra asli Papua, untuk berkembang maju mengejar ketertinggalannya dengan putra-putra daerah yang lain.

Saudara-saudara para anggota Dewan yang terhormat, Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah air, erat kaitannya dengan upaya kita bersama untuk mempertahankan kedaulatan negara dari setiap gangguan dan ancaman, kita tidak punya pilihan lain, kecuali membangun pertahanan kita. Kita bersyukur, bahwa sepanjang sejarah berdirinya negara kita, TNI selalu siap sedia dan berada di barisan terdepan dalam mempertahankan kedaulatan negara. TNI kini tengah melakukan upaya untuk memperkuat dan sekaligus meningkatkan kemampuannya, baik organisasi, profesionalitas personil maupun persenjataannya. Upaya untuk mengaktifkan kembali berbagai persenjataan yang sebelum ini tidak dapat

dioperasikan, karena kelangkaan suku cadang, kini telah mengalami banyak kemajuan. Kita juga mengambil langkah-langkah untuk mengadakan alat-alat persenjataan yang baru secara bertahap, sesuai kemampuan anggaran.

Kerjasama pertahanan dengan negara-negara sahabat terus kita tingkatkan, termasuk kerjasama dalam pembangunan industri pertahanan, agar ke depan kita mampu memenuhi kebutuhan sendiri, dalam pengadaan berbagai sistem senjata.

Kita tidak bermaksud untuk memperbesar kekuatan yang sudah ada. Yang hendak kita adalah kekuatan esensial, yang kita anggap cukup tangguh dan mampu untuk mengemuka seluruh wilayah kedaulatan negara kita. Fokus perhatian pertahanan kita, kita arahkan menjaga kawasan perbatasan laut dan darat, terutama pulau-pulau terluar dan terdepan, dan membangun pos-pos pengamanan TNI. Di samping penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan militer, kita pun sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan prajurit, agar setiap prajurit dan mampu menjalankan tugas membela bangsa dan negara. Kita terus-menerus berupaya menaikkan gaji, uang lauk pauk, tunjangan hari tua, serta pengadaan dan perbaikan perumahan bagi prajurit kita. Menjaga dan memelihara kondisi aman dan damai di dalam negeri, tidak bukan semata-mata menjadi tugas aparaturnya pertahanan dan keamanan, tetapi menjadi kewajiban seluruh warga bangsa. Tanpa dukungan seluruh rakyat, mustahil suasana aman, tertib dan itu dapat kita ciptakan.

Kita patut bersyukur, bahwa kemampuan POLRI dalam menangkis dan menanggulangi keamanan dan ketertiban masyarakat, telah jauh meningkat. Setahap demi setahap, citra sebagai aparaturnya penegak hukum dan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, membaik. Namun demikian, POLRI akan terus menghadapi tantangan yang tidak ringan menanggulangi berbagai bentuk dan jenis kejahatan. Kejahatan yang harus diberantas itu saja yang bersifat trans-nasional seperti kejahatan narkoba, terorisme, pencucian uang, perdagangan manusia, tetapi juga berbagai kejahatan konvensional yang mengganggu ketenteraman masyarakat, seperti pembunuhan, perjudian, penodongan, pencurian dan perampokan. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan program peningkatan kemampuan profesionalitas POLRI dalam menanggulangi setiap bentuk kejahatan, agar masyarakat menikmati rasa aman dan tenteram.

Kita pun mencatat banyak kemajuan dalam menanggulangi aksi-aksi terorisme. Semua ini berkat kesigapan aparaturnya keamanan, dukungan masyarakat dan peningkatan kerjasama internasional. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh warga bangsa, yang telah mendukung penanggulangan setiap ancaman teror, yang telah mengancam keselamatan jiwa dan hartabenda. Sepanjang tahun 2006 bersyukur, karena negara kita tidak mengalami serangan terorisme. Namun demikian, saya yang mulai kondusif ini, jangan sampai membuat kita lengah dan kurang waspada. Apa kepolisian telah berhasil membongkar jaringan dan melumpuhkan kegiatan teror Dr. / Namun, jaringan teroris yang dipimpin oleh Nordin Mohammad Top ---- yang hingga kini tertangkap --- masih terus melakukan kegiatan-kegiatannya. Aparaturnya keamanan terus bertekad keras memberantas terorisme di tanah air. Namun demikian, saya ingin menegaskan ke

pendirian

Pemerintah, bahwa upaya memerangi terorisme, tetap berpegang teguh kepada asas-asas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemberantasan terorisme tidak ada kait dengan agama atau identitas tertentu, karena kenyataannya, di dunia ini, kejahatan dan dilakukan oleh kelompok yang beragam agama dan identitasnya.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang sa hormati,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, pembangunan bangsa dan negara kita, t mungkin dilepaskan keterkaitannya dengan upaya untuk menciptakan masyarakat yang demokratis. Dalam rangka itulah, kita bertekad untuk membangun dan menegakkan hu memberantas korupsi, dan memantapkan konsolidasi demokrasi. Prioritas Pemerintah c memberantas tindak pidana korupsi, sedikit banyaknya telah membuahkan hasil. Denga mempercepat pemberantasannya, kini setahap demi setahap, mulai timbul budaya takut melakukan korupsi.

Momentum ini sangat penting untuk dipelihara dan dipupuk, untuk mencegah timbulny kasus tindak pidana korupsi yang baru. Selain memelihara momentum itu, Pemerintah j meningkatkan kemampuan aparaturnya untuk menuntaskan kasus-kasus ti pidana korupsi yang telah terjadi. Pemerintah telah berhasil mewujudkan sinergi deng Pemberantasan Korupsi (KPK) ----sebagai badan independen yang berada di luar Peme dalam menanggulangi korupsi. Berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku-pelaku ti pidana korupsi, saat ini kita sama-sama dapat menyimak dan mengikuti proses hukum l kasus korupsi, yang telah dan sedang diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, l oleh peradilan umum.

Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tim Tastipikor) yang dibentuk awal tahun 2005, juga telah melaksanakan langkah-langkah tegas dalam menangani tin pidana korupsi. Dalam menanggulangi berbagai kasus korupsi, Pemerintah tetap bersik tanpa pandang bulu. Tidak akan pernah ada istilah "tebang pilih" dalam menindak pela korupsi, apalagi korupsi berskala besar yang nyata-nyata telah merugikan keuangan nega menyengsarakan rakyat. Saya menyadari, bahwa konsekuensi sikap tegas itu, telah meny rasa kekhawatiran, dan bahkan rasa ketakutan yang berlebihan di sebagian kalangan pe keputusan dan aparaturnya di lapangan.

Saya ingin menegaskan, bahwa kekhawatiran dan ketakutan itu tidak perlu ada, sepanjang tindakan dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di aparat penegak hukum wajib untuk bersikap hati-hati dalam menerima dan mempelajari laporan, agar jangan salah bertindak. Kita harus mencegah timbulnya fitnah, dan penc nama baik seseorang, yang dapat merendahkan harkat dan martabat seseorang yang bel bersalah. Saya juga telah memerintahkan agar koordinasi penegakan hukum benar-bene dilaksanakan secara baik, agar tidak terjadi pemeriksaan terhadap kasus yang sama sec berulang-ulang oleh berbagai instansi, sehingga mengganggu efektifitas bekerja dan be

Untuk memperkuat komitmen kita dalam memberantas korupsi, dan dalam rangka menii

citra bangsa dan negara kita kepada dunia internasional, kita telah meratifikasi Konvensi untuk Melawan Korupsi, atau United Nations Convention Against Corruption. Kita juga meningkatkan kerjasama regional dan internasional dalam menanggulangi tindak pidana. Upaya memerangi tindak pidana korupsi, tidak akan berhasil tanpa langkah pencegahan terutama pembenahan birokrasi, dan perbaikan gaji aparatur birokrasi kita. Langkah itu tidak akan terus kita lakukan.

Perbaikan sistem birokrasi kita lakukan dengan lebih berorientasi pada prestasi dan kinerja. Reformasi ini sejalan dengan reformasi sistem pengelolaan keuangan negara, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004. Reformasi birokrasi dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi kelembagaan, organisasi, manajemen, dan sumberdaya manusia. Langkah ke arah itu telah dimulai dengan menyusun tiga RUU, yaitu: (1) RUU tentang Pelayanan Publik; (2) RUU tentang Administrasi Pemerintahan; dan (3) RUU tentang Efisiensi Penyelenggara Negara. Ketiga RUU itu, telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan segera akan diajukan kepada DPR-RI untuk dibahas pada tahun 2007 yang akan datang.

Persoalan lain dalam penegakan hukum yang terus menjadi perhatian Pemerintah, adalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba serta obat-obat berbahaya, atau kejahatan narkoba. Kejahatan narkoba tetap menjadi ancaman, bagi kelangsungan hidup generasi muda di masa depan. Meskipun perang terhadap kejahatan narkoba telah kita lakukan tanpa henti, aksi kejahatan tersebut masih terus berkembang. Tahun ini Kepolisian telah berhasil membongkar sejumlah pabrik yang memproduksi narkoba dan obat-obat berbahaya dalam jumlah yang sangat besar.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, dalam rangka pembangunan kesejahteraan kita telah berada dalam jalur pencapaian sasaran Millenium Development Goals (MDG). Kita telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dari 23,4 persen pada tahun 1999 menjadi 16,4 persen pada tahun 2005 lalu. Namun pencapaian sebesar 16 persen itu masih jauh dari yang ingin kita capai. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga kualitas pertumbuhan yang menyentuh langsung perbaikan nasib rakyat miskin. Kita harus memastikan agar pertumbuhan ekonomi yang kita kejar menjamin terjadinya pengurangan kemiskinan. Akan sia-sia kita membangun, kalau kita tidak mampu mengangkat rakyat kita dari lembah kemiskinan dan keterbelakangan. Sebab itu Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi, dan menyediakan anggaran yang cukup untuk rakyat miskin agar dapat memiliki kesempatan menempuh pendidikan, meningkatkan kesehatan, dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Kita telah melaksanakan Subsidi Bantuan Tunai selama satu tahun kepada 19,2 juta rumah tangga miskin. Program yang kita laksanakan dalam waktu amat singkat itu, sebagai langkah mengatasi kenaikan harga BBM tahun yang lalu, telah berhasil mengurangi beban biaya kelompok termiskin kita. Tahun 2006 ini, Pemerintah juga telah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar sembilan tahun kepada 29,4 juta murid setara SD, dan 10,5 juta bagi murid setara SMP yang tergolong miskin. Pada jenjang pe-

menengah atas atau setara SMA, disediakan beasiswa kepada 698 ribu lebih pelajar ke-1000 pelajar miskin. Jumlah murid SD dan yang setara adalah 41 juta orang. Sedangkan untuk pendidikan menengah, kini berjumlah 6,4 juta orang. Jumlah ini telah melampaui target yang ingin dicapai pada tahun ajaran 2005/2006. Dengan demikian, terbengkalainya kesempatan menempuh pendidikan, lebih-lebih bagi rakyat miskin, setahap demi setahap telah dapat diatasi. Pemerintah telah dengan sungguh-sungguh mendorong dan membuka kesempatan pendidikan bagi setiap anak di negeri kita.

Sementara itu, jumlah kabupaten/kota yang telah berhasil menuntaskan program wajib pendidikan dasar 9 tahun, pada akhir tahun 2004/2005, telah mencapai 142 kabupaten/kota. Angka ini meningkat dari 77 kabupaten/kota pada akhir tahun 2003/2004. Seiring dengan keinginan kuat dan kesungguhan Pemerintah untuk meningkatkan anggaran pendidikan dengan amanat Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, revitalisasi pendidikan terus dilakukan untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan. Dalam konteks ini, kita wajib bersyukur bahwa pada bulan Agustus tahun ini, para pelajar telah mampu meraih 28 medali emas dalam berbagai ajang kompetisi internasional di bidang sains, matematika, seni dan olahraga. Di antara mereka, terdapat seorang pelajar bernama Jonathan Pradana Mailoa, yang berhasil meraih predikat The Absolute Winner dalam Olimpiade Fisika Internasional 2006 di Singapura. Keberhasilan ini telah mematahkan dominasi para pelajar China, dan menyisihkan pesaing-pesaingnya dari Amerika Serikat, Jerman dan Australia. Sementara Rudolf Surya Bonay, seorang pelajar asal Papua, berhasil memenangkan The Step to Nobel Prize di bidang kimia. Keberhasilan ini, hendaknya memantapkan keyakinan, kemampuan generasi muda kita, dan memacu kita semua untuk bekerja keras lagi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

Sementara itu, pelayanan kesehatan dasar kepada rakyat miskin dan mendekati miskin dengan tahun 2005 telah mencapai jumlah 60 juta jiwa. Pemerataan pelayanan kesehatan dilakukan dengan membangun Puskesmas pada setiap kecamatan. Dalam penyediaan perlengkapan kesehatan, ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan mencapai 80-100 persen. Untuk membantu rakyat miskin, Pemerintah telah menurunkan harga obat generik antara 30 sampai 50 persen pada bulan Mei yang lalu. Pada bulan Agustus Pemerintah kembali menurunkan harga 1418 jenis obat generik antara 60 sampai 80 persen. Mulai tanggal 17 Agustus tahun ini, Pemerintah akan mencantumkan labelisasi obat generik sekaligus mencantumkan harganya untuk dijual di pasaran. Dengan murahnya harga obat, kita berharap, rakyat kita akan makin mampu membelinya. Pencantuman harga juga merupakan upaya untuk menjamin agar harga obat tidak dipermainkan oleh para spekulan. Pemerintah terus berupaya, untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, guna menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan penyuluhan kesehatan, termasuk kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (posyandu) juga mulai diaktifkan kembali. Jumlah Posyandu yang telah berhasil diaktifkan kembali, kini telah mencapai 42.221 unit di seluruh tanah air.

Saudara pimpinan, para Anggota DPR dan hadirin yang saya muliakan, izinkanlah saya, Ketua, untuk beralih menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan pembangunan ekonomi. Dalam dua tahun terakhir, kita menyaksikan dinamika perkembangan ekonomi global yang memberikan tantangan tidak ringan bagi pengelolaan ekonomi kita. Kecenderungan hal

minyak yang tinggi dan penerapan kebijakan moneter ketat di sejumlah negara maju, ter
Amerika Serikat dan Uni Eropa, berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Koordinasi
Bank Indonesia dan Pemerintah di dalam pengelolaan kebijakan ekonomi makro telah :
baik. Hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi, yang merupak
prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Stabilitas ekonomi yang terjaga telah meningkatkan kepercayaan pelaku pasar, sebagai
tercermin dalam masuknya investasi portofolio, yang telah mendorong perbaikan neraca
pembayaran dan penguatan cadangan devisa kita. Namun demikian, arus modal yang b
jangka pendek harus dikelola dengan hati-hati dan bijaksana, karena rentan terhadap pe
sentimen yang dapat menimbulkan gejolak perekonomian.

Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus berupaya untuk menyempurnakan kebijakan
mekanisme, peraturan, instrumen, serta kualitas institusi ekonomi dan industri keuangan
antara lain, tertuang dalam paket kebijakan reformasi sektor keuangan. Langkah ini dij
agar perekonomian kita makin memiliki kelenturan dan daya tahan, terhadap gejolak d
ketidak-pastian. Langkah ini sejalan pula dengan upaya jangka menengah dan panjang
meningkatkan investasi langsung, yang sangat penting untuk menciptakan kesempatan l
mengurangi kemiskinan, serta memperkuat neraca modal dan cadangan devisa kita. Set
mempercepat pembayaran pinjaman kepada IMF pada Juni tahun ini sebesar 3,8 milyar
AS, posisi cadangan devisa kita diperkirakan mencapai sekitar 43 miliar dolar AS pada
tahun 2006, meningkat 24% dari posisi 34,7 miliar dolar AS tahun 2005.

Membaiknya kinerja neraca pembayaran, baik dari arus barang dan jasa maupun arus me
penguatan posisi cadangan devisa kita dalam tahun 2006, telah memperkuat nilai tukar
terhadap dolar Amerika Serikat, dengan fluktuasi yang relatif terkendali. Meskipun de
kita masih perlu terus mewaspadaai kemungkinan terjadinya pergerakan dinamis nilai tu
mata uang global, sebagai akibat dari koreksi terhadap ketidakseimbangan global. Stabil
tukar Rupiah, telah menunjang upaya kita untuk menurunkan inflasi ke tingkat yang lel
rendah. Sampai dengan bulan Juli 2006, laju inflasi mencapai sebesar 3,3 persen, jauh
rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,09 persen.

Secara keseluruhan, sasaran inflasi sebesar 8 persen dalam tahun 2006 diperkirakan ak
dicapai. Sejalan dengan menurunnya tingkat inflasi, serta dengan tetap memperhatikan
perkembangan tingkat bunga internasional, Bank Indonesia mulai menurunkan tingkat
bunganya secara hati-hati. Penurunan itu diharapkan akan mendorong pertumbuhan inv
melalui perbaikan intermediasi perbankan, pemulihan kepercayaan pasar, dan penurun
pinjaman. Penurunan inflasi dan suku bunga, juga akan menurunkan beban biaya bunga
dalam APBN. Meskipun kinerja ekonomi makro menunjukkan perbaikan yang signifik
pemerintah sepenuhnya menyadari, bahwa upaya peningkatan kesejahteraan rakyat mas
mencapai tingkat yang diharapkan. Dimensi permasalahan yang dihadapi memang sang
kompleks.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2005 mencapai angka 5,6%, meskipun kita berharap dapa
mencapai 6%. Kecenderungan perlemahan ekonomi ini masih terjadi pada triwulan per
tahun ini, meskipun mulai kita lihat arah pembalikan yang positif pada triwulan kedua.
Pemerintah akan terus menanggulangi perlemahan ekonomi ini melalui ekspansi fiskal

terukur,

pelonggaran moneter yang berhati-hati dari Bank Indonesia, serta pelaksanaan kebijakan struktural, seperti paket kebijakan perbaikan iklim investasi, percepatan pembangunan infrastruktur, dan reformasi sektor keuangan.

Pertumbuhan ekonomi dalam triwulan I 2006 tercatat sebesar 4,7 persen. Dalam triwulan pertumbuhan ekonomi menunjukkan gejala peningkatan dan tercatat sebesar 5,2 persen tinggi dari yang diperkirakan oleh banyak pihak. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2006 mencapai hampir 5 persen. Perbaikan pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua kita harapkan sebagai pertanda awal dari konsolidasi dan perkuatan kegiatan ekonomi yang akan makin mantap pada semester II tahun 2006, sehingga terbangun fundamental yang lebih kukuh bagi percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya.

Seperti telah saya katakan sebelumnya, pengentasan kemiskinan merupakan satu paket yang tidak terpisahkan dengan upaya penciptaan lapangan kerja, yang menjadi fokus utama dari kebijakan ekonomi pemerintah. Pemerintah telah dan akan terus menyempurnakan dan mensinergikan program penciptaan lapangan kerja, dengan berbagai program strategis dan diversifikasi energi, pembangunan infrastruktur perdesaan, serta program pembangunan perumahan.

Tingkat pengangguran telah mulai menurun dari 11,2% pada bulan November tahun 2005 menjadi 10,4 persen pada awal tahun 2006. Penurunan tingkat pengangguran ini baru kali terjadi, setelah dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan. Meskipun demikian, tingkat pengangguran itu tetap masih tinggi dan berdampak negatif, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Penurunan pengangguran memang telah menjadi komitmen kita bersama dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Dasar. Kemampuan kita untuk mengurangi tingkat pengangguran akan ditentukan oleh apakah kita dapat merumuskan dan menyepakati kebijakan yang tepat dan berkualitas, dan menjalankannya secara konsisten dan tepat untuk memanfaatkan segala momentum yang kita miliki. Saya sungguh berharap, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dapat membangun kerjasama yang makin sinergis dan konstruktif untuk dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan yang vital bagi perbaikan iklim investasi. Dengan demikian, investasi akan tumbuh, dan makin terbuka pula peningkatan kesempatan kerja. Berbagai Rancangan Undang-undang yang akan dan sedang dibahas bersama DPR di bidang investasi, perpajakan, kepabeanaan, cukai, dan lainnya, merupakan kunci bagi perbaikan ekonomi kita. Saya berharap, Dewan dapat memberikan prioritas pembahasan terhadap rancangan undang-undang ini, agar segera dapat kita setujui bersama.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, Saudara-saudara sebangsa dan seair, tibalah saatnya sekarang, bagi saya, untuk menyampaikan hal-hal pokok yang berkaitan dengan penyusunan RAPBN Tahun 2007. Dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan ekonomi domestik dan internasional, serta tujuan nasional yang ingin kita capai, saya mengusulkan kepada Dewan Rancangan APBN 2007, dengan asumsi dasar sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 6,3 persen, inflasi 6,5 persen, suku bunga SBI 3 bulan 8,5 persen, nilai tukar Rp 9.300 per dolar AS, harga minyak US\$ 65 per barel, dan lifting minyak sebesar 100 barel per hari.

Program dan penganggarannya dalam RAPBN 2007 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2007 yang memiliki fokus pada Peningkatan Kesempatan Kerja dan

Penanggulangan Kemiskinan, dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. RKP 2007 menetapkan sembilan prioritas program kerja yaitu: pertama, penanggulangan kemiskinan. Kedua, peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor. Ketiga, revitalisasi pertanian, kehutanan, dan perdesaan. Keempat, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan. Kelima, penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi. Keenam, penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan ketertiban, serta penyelesaian konflik. Ketujuh, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Darussalam (NAD), Nias, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta mitigasi bencana. Kedelapan, percepatan pembangunan infrastruktur, dan kesembilan, pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir.

Saudara Ketua, Para Anggota Dewan dan Para hadirin yang saya muliakan, kebijakan fiskal tahun 2007 disusun secara konsisten dengan berbagai program dan prioritas kebijakan. Strategi kebijakan fiskal tetap dilaksanakan dalam dua koridor utama, yakni, pertama, konsolidasi fiskal melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang tepat, untuk keseimbangan antara penciptaan ruang bagi kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja, namun masih dalam batas sumber pendanaan yang aman dan berkelanjutan. Kedua, merumuskan strategi pembiayaan anggaran, agar terjadi penurunan beban dan risiko utang pemerintah yang seminimal mungkin. Sehubungan dengan hal itu, direncanakan dan akan diwujudkan dalam belanja RAPBN 2007 sebagai berikut:

Pertama, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pengeluaran kesehatan akan ditingkatkan dari Rp 13,5 triliun dalam tahun 2006 menjadi Rp 15,1 triliun. Peningkatan anggaran kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pelayanan dan pemerataan kesehatan. Dalam rangka mengatasi meningkatnya penyebaran penyakit menular, khususnya burung, telah dilakukan upaya surveilans aktif. Selain itu diperkuat pula kemampuan laboratorium regional, penyediaan obat anti virus, dan penyediaan alat pelindung diri.

Alokasi anggaran pendidikan juga mengalami peningkatan signifikan. Dewasa ini pengalokasian pemerintah untuk pendidikan ---dengan menggunakan definisi yang luas--- telah mencapai 10,5 persen dari PDB. Dalam RAPBN 2007, pemerintah mengajukan anggaran pendidikan berdasarkan pendekatan fungsi sebesar Rp 51,3 triliun, atau naik 18,5 persen dibandingkan APBN 2006 sebesar Rp 43,3 triliun. Pengeluaran itu, belum termasuk pengeluaran untuk gaji guru yang menjadi bagian dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk bidang pendidikan serta anggaran kedinasan. Pemerintah terus berupaya secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan anggaran pendidikan, baik nominal maupun rasionya terhadap belanja pemerintah pusat, guna memenuhi amanat UU Sisdiknas.

Program Bantuan Langsung Tunai atau BLT akan dimodifikasi sebagai BLT Bersyarat. BLT Bersyarat ini akan dikaitkan dengan program pendidikan dan kesehatan yang akan diluncurkan pada awal tahun 2007, dan diujicobakan di beberapa provinsi. Program akan menggunakan anggaran Rp 4 triliun pada RAPBN 2007. RAPBN 2007 juga merencanakan pemberian dan penyaluran beras dengan harga murah bagi sekitar 15,8 juta keluarga miskin sebesar Rp 6,5 triliun. Subsidi harga pupuk sebesar Rp 5,8 triliun, dan Subsidi Pelayanan (PSO) untuk BUMN yang menjalankan tugas pemerintah di bidang pelayanan umum ke masyarakat.

Kedua, perbaikan iklim investasi. Dukungan APBN untuk memperbaiki iklim investasi di beberapa program reformasi kebijakan dan pelayanan publik. Reformasi di bidang pe- dan kepabeanan mendapatkan dukungan dana yang meningkat. Pelayanan kepada dunia akan diperbaiki melalui reformasi birokrasi dengan dana yang cukup memadai. Alokasi daerah juga meningkat, sehingga diharapkan berbagai macam pungutan di daerah oleh Pemerintah daerah, akan berkurang.

Ketiga, pemerintah mengalokasikan belanja yang cukup signifikan untuk memperbaiki dan prasarana fisik penunjang investasi. Pembangunan sarana dan prasarana fisik diwujudkan dalam bentuk peningkatan untuk belanja modal, yang akan dipergunakan untuk kegiatan investasi sarana dan prasarana pembangunan. Peningkatan itu, antara lain dalam bentuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta modal fisik lainnya yang direncanakan sekitar Rp 66,1 triliun atau meningkat sebesar 4,9 persen dari pagu anggaran sebelumnya. Dalam rangka pembiayaan infrastruktur melalui program kemitraan, seperti telah saya singgung tadi, tahun 2006 ini telah disampaikan kepada Dewan mengenai pembentukan Dana Pembangunan Infrastruktur, yang bersama dengan partisipasi lembaga internasional dan swasta, akan menjadi dana awal atau katalis bagi percepatan pembangunan infrastruktur. Dana itu, di samping untuk alokasi investasi, khususnya proyek infrastruktur akan dipergunakan untuk pembagian risiko dengan investor swasta. Dalam RAPBN 2006 Pemerintah mengusulkan alokasi pembiayaan sebesar Rp 2 triliun rupiah, sebagai tambahan pembagian risiko dan modal pembiayaan investasi pemerintah tersebut.

Keempat, di bidang kebijakan energi, akan diarahkan pemanfaatan sumber energi pengganti minyak bumi yang berasal dari batubara dan gas, serta energi terbarukan khususnya biofuel yang lebih murah, sehingga lebih terjangkau masyarakat. Kebijakan ini akan memakan waktu, sehingga RAPBN 2007 masih tetap menyediakan subsidi BBM dan listrik. Subsidi BBM dialokasikan sebesar Rp 68,6 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 25,8 triliun. Penyediaan subsidi yang cukup besar ini, dilakukan karena Pemerintah menyadari dengan sungguh-sungguh daya beli masyarakat yang lemah, akibat pengurangan subsidi BBM tahun yang lalu. Proporsi penggunaan BBM di tahun 2007 sebagai energi pembangkit listrik sudah mulai menurun, dan digantikan oleh batubara dan gas. Tahun 2008 diharapkan alokasi subsidi BBM dan listrik akan menurun drastis karena penggunaan gas untuk PLTG. Di tahun 2009, seluruh pembangkit listrik di Pulau Jawa diharapkan sudah dapat dipenuhi oleh pembangkit non BBM. Untuk pengembangan energi biofuel, pemerintah akan memanfaatkan alokasi belanja modal dari berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung program itu. Di samping itu, juga disediakan subsidi kredit usaha biofuel sebesar Rp 1 triliun.

Kelima, sebagai bagian dari dukungan APBN terhadap program reformasi birokrasi, akan dialokasikan kenaikan 23,3 persen anggaran belanja pegawai dalam tahun 2007. Dalam perhitungan belanja pegawai antara lain ditampung: (i) peningkatan gaji pokok aparat negara dan pensiunan; (ii) pembayaran gaji dan pensiun bulan ketiga belas; (iii) perbaikan tunjangan struktural dan beberapa tunjangan fungsional; (iv) peningkatan tunjangan pengajar dan dosen; (v) anggaran gaji PNS pusat baru sekitar 50.000 orang yang sebagian berasal dari pegawai honorer; (vi) kenaikan uang makan dan lauk pauk bagi anggota T

Polri sekitar 20 persen; serta (vii) peningkatan iuran pemerintah untuk membantu per pelayanan kesehatan kepada pegawai dan pensiunan.

Pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan efisiensi anggaran belanja untuk pemt barang dan jasa, melalui sistem tender dan pengadaan yang lebih transparan dan kom Dengan demikian, masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan pengadaan proyek-p Pemerintah. Kenaikan belanja barang direncanakan tidak lebih dari 31,3 persen. Angg belanja barang dan jasa ini akan digunakan untuk: (i) meningkatkan fungsi pelayanan setiap instansi pemerintah; (ii) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan hara jasa, perjalanan dinas, dan pemeliharaan aset negara; serta (iii) mendukung kelancara kegiatan operasional pemerintahan, baik di dalam negeri maupun kantor-kantor perwak di luar negeri. Kenaikan anggaran belanja barang dalam negeri antara lain digunakan menampung rencana kenaikan indeks biaya perjalanan dinas pada seluruh departemen LPND.

Keenam, untuk mitigasi bencana alam, mulai APBN-P Tahun 2006 dan dalam RAPBN pemerintah mengajukan peningkatan alokasi belanja untuk pembangunan sistem pendikteksian dini (early warning system) bencana, masing-masing tambahan sebesar milyar untuk tahun 2006 dan Rp 150 milyar untuk tahun 2007. Dana alokasi pasca ber melalui cadangan umum adalah sebesar Rp 2 triliun di tahun 2007. Pada saat ini sedar dibahas tambahan belanja penanggulangan bencana untuk rehabilitasi dan rekonstruks Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah serta daerah terkena bencana lainnya. Pr rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami di daerah Aceh dan Nias akan terus dipant sesuai jadwal.

Di samping terhadap keenam jenis belanja tadi, dalam RAPBN 2007 dialokasikan bel Pemerintah Pusat untuk membayar bunga utang, baik utang dalam negeri maupun utar negeri yakni sebesar Rp 85,1 triliun. Dengan demikian, total belanja pemerintah pusat tahun 2007 adalah sebesar Rp 496 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 16 persen dibanding APBN 2006.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang saya hormati, RAPBN 2007 mengalokasikan b kepada Pemerintah Daerah untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan bagi masy daerah sebesar Rp 250,5 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 13,8 persen dibandi tahun 2006. Dana Alokasi Umum (DAU), yang merupakan instrumen untuk mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah, dialokasikan sebesar 26 persen dari pendapatan dalam negeri bersih. Seiring dengan peningkatan penerimaan dalam negeri alokasi DAU dalam tahun 2007 direncanakan sebesar Rp 163,7 triliun atau meningkat persen dari alokasi DAU dalam tahun sebelumnya.

Sejalan dengan peningkatan alokasi DAU, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) juga ditingkatkan. Untuk itu, alokasi DAK dalam tahun 2007 direncanakan sebesar Rp 14,4 t Jumlah ini berarti mengalami peningkatan 24,1 persen dari alokasi DAK dalam tahun sebelumnya. Selanjutnya, alokasi dana otonomi khusus dan penyesuaian dalam tahun : direncanakan sebesar Rp 6,7 triliun. Dari jumlah dana otonomi khusus itu, dana otono khusus murni untuk Provinsi Papua direncanakan sebesar Rp 3,3 triliun atau setara 2 (

persen dari alokasi DAU, yang penggunaannya diarahkan terutama untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Di samping itu, guna memenuhi amanat Pasal 34 ayat (3) h Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 kepada Provinsi Papua juga disediakan dana tambahan dalam rangka pembangunan infrastruktur sebesar Rp 800 milyar, yang penggunaannya diperuntukkan bagi pembangunan prasarana jalan dan perhubungan.

Untuk memenuhi kebutuhan belanja, baik di tingkat pusat maupun daerah, diperlukan pendapatan yang berasal dari perpajakan dan penerimaan bukan pajak serta hibah. Pendapatan negara dan hibah dalam RAPBN 2007 direncanakan mencapai sebesar Rp 713,4 triliun naik 14,1 persen dari APBN tahun 2006. Sumber pendapatan negara tahun 2007 direncanakan terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 505,9 triliun, penerimaan bukan pajak Rp 204,9 triliun dan hibah Rp 2,7 triliun. Perkiraan pendapatan negara dan hibah berarti sekitar 71,2 persen ditopang dari penerimaan perpajakan, dan sekitar 28,8 persen bersumber dari penerimaan bukan pajak. Rasio perpajakan atau tax ratio meningkat dari 13,7 persen di tahun 2006 menjadi 14,3 persen pada tahun 2007. Kontribusi penerimaan sektor perpajakan yang semakin meningkat, menunjukkan bahwa pemerintah tetap konsisten untuk terus menggali sumber pendanaan dari dalam negeri, dalam rangka mewujudkan tingkat dan mutu kemandirian APBN.

Seperti telah saya kemukakan, untuk menurunkan tingkat kemiskinan, sesuai dengan sasaran jangka menengah hingga akhir 2009, kita tidak hanya memerlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun juga harus memastikan agar pertumbuhan ekonomi benar-benar memberikan manfaat langsung kepada penduduk miskin. Kita menginginkan pertumbuhan yang disertai pemerataan. Upaya ini dijabarkan dalam bentuk program khusus, berupa perluasan dan integrasi program penanggulangan kemiskinan berbasis partisipasi masyarakat di daerah perdesaan dan perkotaan.

Sampai tahun 2006, program ini telah mencakup 39.282 desa/kelurahan dari 69.929 desa/kelurahan yang ada, yang meliputi 2600 kecamatan, atau 46% dari 5623 kecamatan ada di seluruh tanah air. Perluasan ini akan dilakukan bertahap, sehingga diharapkan pada tahun 2009, semua kecamatan telah terjangkau oleh program ini. Manfaat program ini disamping dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan keluarga miskin, juga sekaligus memperbaiki infrastruktur dan prasarana publik di tingkat desa dan kecamatan. Apabila seluruh program ini berjalan sesuai rencana, maka akselerasi pertumbuhan ekonomi dan upaya memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat akan dapat kita capai. Di samping itu, program ini juga menumbuhkan modal sosial, seperti partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam proses pembangunan. Modal sosial ini sangat penting untuk menjaga kebersamaan, dan diharapkan mampu mencegah potensi ketegangan dan konflik antar kelompok masyarakat.

Pemerintah akan terus menyempurnakan sistem perlindungan bagi keluarga miskin. Seperti telah saya uraikan di muka, sejak tahun 2006 dari hasil penghematan subsidi BBM, kita telah berhasil memperkenalkan program yang langsung menyentuh rakyat miskin, seperti sistem asuransi kesehatan untuk rumah tangga miskin dan Subsidi Langsung Tunai (SLT), Bantuan Operasional Sekolah atau BOS, dan

pembangunan infrastruktur perdesaan. Program ini akan dilanjutkan pada tahun 2007 dengan beberapa perbaikan, seperti Bantuan Langsung Tunai Bersyarat untuk menunjang perbaikan akses pendidikan dan kesehatan keluarga miskin, dan program padat karya di tingkat desa yang dapat menciptakan lapangan kerja.

Peningkatan kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari kinerja sektor pertanian dan ekowisata perdesaan serta ketahanan pangan. Untuk itu, Pemerintah telah mencanangkan program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Saran DPR untuk mengintegrasikan subsidi pertanian akan segera dirintis dalam tahun anggaran 2007. Program perbaikan subsidi pertanian yang terintegrasi dari segi efektivitas maupun efisiensinya, kita sudah merupakan program yang cukup rumit. Dampak dari integrasi ini, baru akan dirasakan tahun-tahun berikutnya.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat, hadirin yang saya muliakan, sekarang, Saudara Ketua, saya akan beralih untuk membicarakan masalah energi, dan berbagai masalah dalam pembangunan ekonomi nasional kita. Masalah energi telah menjadi isu yang vital dan strategis, baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Di tahun lalu pemerintah telah meluncurkan kebijakan energi nasional yang komprehensif menyangkut peningkatan sisi produksi, diversifikasi sisi permintaan, maupun kebijakan yang makin realistis. Pengembangan energi alternatif menjadi pilihan yang penting, bukan saja untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM yang harganya terus meningkat, tetapi sekaligus juga untuk memecahkan masalah kemiskinan dan pengangguran, serta perbaikan lingkungan hidup. Ketergantungan pada BBM sebagai sumber energi utama, juga mengandung risiko keuangan negara yang tidak sedikit, dengan makin besarnya subsidi

Negara kita memiliki berbagai sumber energi alternatif dalam jumlah yang cukup besar seperti gas, batubara, tenaga hidro, panas bumi, tenaga surya dan lainnya. Investasi di bidang ini masih perlu dikembangkan. Pemerintah sendiri tidak mungkin melakukan investasi di bidang ini, mengingat biayanya yang sangat besar. Itulah sebabnya, mengapa Pemerintah mendorong agar pihak swasta, dalam dan luar negeri, secara aktif melakukan investasi di bidang energi alternatif ini. Pemerintah juga sedang menyusun langkah-langkah pengembangan energi alternatif berbasis nabati atau biofuel. Program Nasional ini telah dimulai tahun ini dengan pengembangan energi dengan bahan dasar kelapa sawit, jagung, tebu, singkong, dan jarak. Untuk daerah tertentu, terutama daerah terpencil dan belum berkembang, akan dilaksanakan program desa mandiri energi berbasis pohon jarak. Dengan demikian, desa-desa itu diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhannya, tanpa tergantung kepada solar dan minyak tanah. Dalam jangka menengah, kebijakan energi diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja baru antara 3 hingga 5 juta orang. Dengan demikian, langkah ini juga akan menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan, serta mengurangi subsidi BBM secara signifikan.

Saudara Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat, hadirin sekalian yang terhormat, Sesuai dengan arah kebijakan fiskal, serta rencana anggaran pendapatan negara dan belanja negara dan anggaran belanja negara sebagaimana saya kemukakan tadi, maka RAPBN 2007 akan mengalami defisit anggaran sekitar Rp 33,1 triliun atau 0,9 persen terhadap PDB. Untuk membiayai defisit anggaran, pemerintah merencanakan penggunaan sumber-sumber

pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri, dengan tetap berorientasi pada upaya pembiayaan yang stabil dan berkelanjutan, dengan beban dan risiko seminimal mungkin. Selain untuk menutup defisit anggaran, pembiayaan anggaran juga dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan pokok utang dalam negeri dan luar negeri yang akan jatuh tempo dalam tahun 2007, dan penyertaan modal negara untuk penyehatan BUMN yang masih bermasalah.

Dalam RAPBN 2007, pembiayaan anggaran yang bersumber dari dalam negeri secara direncanakan mencapai Rp 51,3 triliun. Pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri direncanakan berasal dari: (i) Penerbitan Surat Utang Negara atau SUN dengan mempertimbangkan kebijakan fiskal dan moneter secara terpadu; (ii) dana eks moratorium untuk membiayai program rekonstruksi dan rehabilitasi NAD-Nias; (iii) penjualan aset program restrukturisasi perbankan secara optimal; (iv) menggunakan dana simpanan pemerintah di Bank Indonesia; dan (v) privatisasi. Perlu saya kemukakan, bahwa sumbu pembiayaan privatisasi dirancang pada tingkat yang cukup rendah, karena pemerintah menyadari bahwa program privatisasi tidak seharusnya ditujukan semata-mata untuk memenuhi pembiayaan defisit APBN, namun yang lebih penting adalah upaya penyehatan peningkatan kinerja BUMN seperti amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN.

Sementara itu, pembiayaan anggaran yang berasal dari sumber-sumber pinjaman luar negeri neto sebesar Rp 18,2 triliun. Jumlah itu terdiri dari pinjaman program dan pinjaman portofolio sebesar Rp 35,9 triliun, dan dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp 54,1 triliun. Dengan struktur rancangan APBN yang saya sampaikan ini, dan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen, maka rasio utang pemerintah akhir tahun 2007 diperkirakan akan menurun dari sekitar 41,3 persen pada tahun 2006 menjadi sekitar 36,9 persen pada tahun 2007. Penurunan rasio utang pemerintah itu akan makin memperkuat struktur ketahanan fiskal, sejalan dengan tujuan untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, pelaksanaan APBN dan tujuan pembangunan umumnya, tidak mungkin mencapai sasaran tanpa partisipasi seluruh masyarakat dan pelaku ekonomi. Program-program APBN dijalankan dengan meningkatkan perbaikan akuntabilitas publik yang tercermin pada perbaikan kualitas dan keteraturan laporan keuangan negara. Orientasi kebijakan APBN dan fokus pembangunan Indonesia juga akan makin diarahkan pada perbaikan kualitas manusia Indonesia, yang tercakup dalam perbaikan kualitas hidup, tercapainya Millenium Development Index. Arti penting pembangunan manusia Indonesia juga diterjemahkan di dalam peningkatan porsi anggaran untuk pembangunan manusia Indonesia dalam APBN dan APBD di seluruh Indonesia. Ke depan, kita menginginkan pendidikan dan kesehatan yang murah dan infrastruktur dasar yang cukup tersedia, sel seluruh rakyat Indonesia akan dapat memperoleh akses kesehatan dan pendidikan, dua yang merupakan elemen amat penting dalam pembangunan manusia Indonesia.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, mengakhiri pidato kenegaraan saya, seruan Keterangan Pemerintah tentang RAPBN TA 2007 beserta Nota Keuangannya, saya me-